

**PENERAPAN APLIKASI E-VOTING
PADA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

Habib Khoirul efendi
NPP. 30.0452

*Asdaf Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Program Studi Teknologi Rekayasa Ilmu Pemerintahan*

Email: habibkhoirul1403@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Helianus Rudianto, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background: *This research is motivated by the implementation of village head elections in Central Lampung district which still uses a manual system. The PMK Service of the Lampung Regency Government is currently making an alternative election using the e-voting system. Purpose:* The innovation of implementing e-voting in village head elections aims to change the system that was previously carried out using a manual system into an electronic system in the democratic process. **Metode:** *This study uses a descriptive method with an inductive approach. The theory used in this research is the Theory of Application of Calculation Technology in Elections by Heroik M. Pratama & Nurul Amali Salabi..*

Result: *The findings obtained by the authors in this study are the application of e-voting in Pilkakam in Central Lampung Regency, the process of socialization and simulation in villages where e-voting is applied, and the election process using e-voting. Conclusion:* The application of e-voting provides advantages, namely saving time, saving budget, and transparency. Research on the application of technology in the form of e-voting in village head elections has been carried out effectively in 5 (five) selected villages out of 82 (eighty-two).

Keywords: *Application, E-voting, Village Head Election*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Lampung Tengah yang masih menggunakan sistem manual. Dinas PMK Pemkab Lampung tengah membuat alternatif pemilihan menggunakan sistem e-voting. **Tujuan:** Inovasi penerapan e-voting pada pemilihan kepala kampung bertujuan supaya dalam proses demokrasi terdapat perubahan sistem yang sebelumnya dilaksanakan menggunakan sistem manual dirubah menjadi sistem elektronik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan penelitian ini adalah Teori Penerapan Teknologi Perhitungan dalam Pemilu oleh Heroik M. Pratama & Nurul Amali Salabi.

Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penerapan *e-voting* pada Pilkakam di Kabupaten Lampung Tengah, proses sosialisasi dan simulasi pada kampung yang di terapkan *e-voting*, dan proses pemilihan menggunakan *e-voting*. **Kesimpulan:** Penerapan *e-voting* memberikan Kelebihan pada yaitu menghemat waktu, menghemat anggaran, dan transparansi. Penelitian penerapan teknologi berupa *e-voting* pada pemilihan kepala kampung sudah terlaksana secara efektif pada 5 (lima) kampung terpilih dari 82 (delapan puluh dua).

Kata kunci: Penerapan, *E-voting*, Pemilihan Kepala Kampung

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman teknologi semakin maju dan canggih semua aktivitas dan pekerjaan dapat dijalankan dan dipantau melalui teknologi, kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini karena kemajuan teknologi akan berjalan seiring kemajuan pengetahuan. Setiap inovasi yang tercipta memberikan kemudahan bagi manusia dan memberikan nilai dan manfaat yang positif, setiap inovasi yang tercipta memberikan kemudahan bagi manusia dan memberikan nilai dan manfaat yang positif dan manusia sudah menikmati banyak manfaatnya.¹ Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi banyak hal, salah satunya di bidang politik pemerintahan. Kini majunya teknologi informasi dan telekomunikasi juga diterapkan pada sistem pemungutan suara yang umum disebut dengan pencoblosan/pencontrengan, jika dulu pemilihan umum identik dengan kertas dan tinta, sekarang dengan penerapan voting elektronik, masyarakat tidak lagi susah membuka surat suara serta melipatnya kembali usai melakukan pemilihan.²

Secara spesifik aplikasi *elektronik voting* dalam pemilihan kepala desa dianggap lebih menghemat biaya, dan dapat membantu penghitungan suara menjadi lebih cepat. Namun, inovasi ini sendiri menuai banyak pro kontra di berbagai wilayah. Sebagai daerah pionir pelaksana *e-voting*, Kabupaten Jembrana sering dijadikan patokan daerah lain dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu Anistiawati (2014); Hardjaloka & Simarmata (2011) dapat disimpulkan secara umum bahwa pemilihan kepala desa menggunakan metode ini dirasa jauh lebih efektif. Di bidang perkembangan teknologi pada pelayanan publik dan politik Pemerintahan Negara Estonia dapat dikatakan jauh lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lain, diuntungkan dari segi wilayah yang tak terlalu luas dan hanya memiliki 1,3 juta penduduk, seluruh wilayah Estonia sudah dijangkau oleh fasilitas publik lengkap memadai, termasuk cakupan koneksi internet, dengan kondisi ini sejak 2005 melalui *pilot project* pemerintah setempat mereka berhasil menyelenggarakan *e-voting* dengan *budget* rendah atau setengah dari anggaran pengeluaran pemilu manual, meski diklaim sebagai *e-voting* paling berhasil sedunia dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab tinggi, kritik tajam dilayangkan oleh berbagai pihak

¹ Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47.

² Made Leita Anistiawati, "Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (*E-voting*) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)" (2014).

terhadap kebijakan pemerintah negeri di Eropa Utara tersebut, salah satunya datang dari akademisi Universitas Oxford di bidang komputer dan jaringan pada tahun 2016, yang melihat bahwa kesuksesan *e-voting* di sana didukung oleh kepercayaan serta jaringan sosial yang kuat bukan karena kecanggihan teknologi yang diterapkan, bila diaplikasikan ke negara yang jauh lebih padat penduduk dan dengan kepercayaan publik yang rendah, kebijakan yang sama mungkin tidak akan seberhasil itu.

Sebagai perbandingan, sejauh ini *e-voting* di Indonesia juga hanya diterapkan di desa-desa saja dengan pengelompokan wilayah yang ada di permukaan bumi yang tidak terlampaui luas dan tidak padat penduduk. Ide untuk menerapkan inovasi tersebut di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi masih menghadapi dilema tersendiri, belum lagi penetrasi pengguna internet di Indonesia berdasarkan data Hootsuite pada Januari 2020 baru sekitar 64%, itu pun sebagian besar bertitik berat di daerah-daerah kota besar dengan fasilitas jaringan yang memadai, namun kendala-kendala tadi tidak menyurutkan pemerintah desa di beberapa daerah untuk tetap melaksanakan pemilu dengan metode *e-voting*. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Lampung Tengah. Daerah yang berada di bagian selatan Ibu Kota Provinsi Lampung ini, pemilihan kepala kampung/Pilkakam melalui *e-voting* telah diadakan pada tahun 2022, meski baru pertama kali menyelenggarakan, namun pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menilai bahwa sistem pilkades digital diharapkan untuk meningkatkan efisiensi secara signifikan. Alasannya antara lain karena tidak ada kertas suara tidak sah maupun kertas suara sisa yang terbuang, selain itu dengan pelaksanaan *e-voting* akan menjadi langkah awal hadirnya *smart village* atau desa cerdas. Tidak hanya didasarkan pada perkembangan teknologi, pelaksanaan *e-voting* ini juga bermanfaat untuk memaksimalkan sinkronisasi data kependudukan. Bahkan dalam diadakannya Pilkakam secara elektronik di sana, Kabupaten Lampung Tengah akan menjadi daerah pertama di Provinsi Lampung yang menjadi percontohan penyelenggara *e-voting*.

Kini sistem voting non-elektronik telah mengalami persaingan dengan sistem *e-voting* yang diharapkan mampu mengakomodasi asas-asas pemilu secara efektif dan efisien,³ sebuah proses *e-voting* harus dirancang dengan sedemikian rupa supaya sesuai dengan asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur, adil (jurdil) dalam pelaksanaan secara langsung. Dalam konteks demokrasi, sistem pemungutan suara elektronik (*e-voting*) juga harus menjadi atribut dan sifat dari sebuah pemilihan langsung seperti transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi tentunya harus didukung dengan SDM yaitu masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung dalam pemilihan berbasis elektronik (*e-voting*) karena ketidak siapan serta kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap *e-voting* juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem tersebut.

Dengan adanya asa-asas pemilu pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pelaksana dapat berjalan dengan prosedur yang telah berlaku, pemilihan umum adalah sebuah pesta demokrasi yang telah ada sejak tahun 1945 sampai dengan pemilu tahun 2014. Penerapan *e-voting* akan membawa sistem pemilu di Indonesia semakin maju dimana banyak sekali kelebihan yang terdapat pada sistem penerapan *e-voting* selain efektif dan efisien waktu juga tidak menghabiskan banyak biaya dalam pelaksanaan pemilu. *e-voting* memberikan transparansi dalam pelaksanaannya seperti penghitungan suara, alur pemilihan serta hasil suara, dengan demikian akan lebih baik jika sistem *e-voting* terus dikembangkan serta diterapkan pada pemerintahan di Indonesia. Sistem pemilihan menggunakan *e-voting* di Lampung Tengah cukup mempunyai *E-KTP* kemudian akan diperiksa mesin khusus.

³ Loura Hardjaloka and Varida Megawati Simarmata, "E-voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 579.

Identitas pemilik akan dikonfirmasi dengan sidik jari, setelah itu akan keluar kartu pintar khusus untuk mengaktifkan sistem pemilihan kemudian pemilih akan dipandu petugas untuk melakukan pemilihan sampai keluar struk (*print out*) lalu pemilih memasukan struk ke dalam kotak audit.

Kelebihan yang terdapat pada sistem *e-voting* juga terdapat kekurangan pada saat akan diterapkannya dalam pelaksanaan di antaranya seperti banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu sistem *e-voting*, infrastruktur yang belum memadai. Sistem *e-voting* membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang agar *e-voting* dapat dilakukan secara serentak dan lancar pada saat pemilihan umum mendatang. Sistem tersebut memerlukan sumber daya listrik yang cukup kuat untuk mengaktifkan mesin *e-voting* dan tenaga ahli sangat untuk membantu pemilih mengoperasikan serta memperbaiki apabila ada kerusakan.

1.2 kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan penerapan *e-voting* yaitu sebelum adanya *e-voting* pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat bersifat manual yang dimana banyak memakan biaya, waktu, serta kerusakan surat suara dan ada juga kecurangan di karenakan ketidak transparansi pada proses pemilihan. Dinas PMK berserta pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membuat inovasi sebagai alternatif pemilihan kepala kampung yaitu *e-voting*, kelebihan *e-voting* antara lain, yaitu: dalam biaya tidak sebanyak system manual, waktu yang digunakan relative singkat, dalam penggunaannya sangat mudah, serta dalam proses nya sangat transparansi.

E-voting memberikan banya kemudahan dalam pemilihan, namun terdapat juga kekurangan dalam penerapan sistem *e-voting* masyarakat banyak belum mengetahui ap aitu *e-voting* bagaimana cara menerapkannya, dengan adanya kekurangan tersebut maka Dinas PMK bekerja sama dengan Dinas Kominfo melakukan sosialisasi dan simulasi pada 5 (lima) kampung terpilih dari 82 kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan dalam penerapannya di 5 (lima) kampung sudah optimal tetapi belum optimal pada keseluruhan kampung.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan penerapan sistem *e-voting* pada pemilihan dalam pesta demokrasi. Penelitian Imas Novita, Juaningsih, Muhmmaad Saef El-Islam, Dan Adit Nurrafi berjudul Penerapan *E-voting Dalam Sistem Pilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Public Di Era Revolusi Industry 4.0*, penerapan tersebut sebagai salah satu langkah menuju optimalisasi dalam proses pemilihan dalam revolusi industry 4.0 yang di laksanakan di Provinsi Aceh.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Junior Hendri Wijaya, Achmad Zulfikar, dan Iman Manda Permatasari yang berjudul *Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia*, penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi *e-voting* dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia hal ini salah satu Langkah menjadi demokrasi di Indonesia bisa bertransformasi ke arah yang lebih baik. Penerapan *e-voting* saat ini di Indonesia belum merata di seluruh lapisan, sementara ini penerapan *e-voting* banyak di lakukan pada pemilihan kepala kampung atau pemilihan dalam organisasi dan pada ruang lingkup pemilihan Bupati, Gubernur, dan juga presiden belum di terapkan, hal ini menjadi *e-voting* masih dalam pertimbangan apakah penerapan *e-voting* layak di terapkan atau tidak mengingat bahwa setiap inovasi memiliki kekurangan dan

kelebihan demikian juga dengan sistem manual yang sudah bertahun-tahun diterapkan dan banya kejadian ataupun kekurangan yang terjadi di Indonesia.

Penelitian berikutnya yaitu dari Eko Budi Santoso, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhila, dan Annisa Rahmadanita yang berjudul *Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman* yang berkesimpulan bahwasannya penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, teori yang digunakan teknologi pungut-hitung pemilu, penelitian ini di lakukan di Kabupaten Sleman dimana pemilihan kepala desa dilakukan secara digital yang bertujuan mempermudah dalam proses pemilihan dan menerapkan inovasi baru yang diselenggarakan oleh dinas PMK Kabupaten Sleman.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus permasalahan, teori analisis yang dipakai berbeda dan tempat lokasi penelitian pun dilakukan pada Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Kabupaten Lampung Tengah. Berbeda dengan penelitian dari Imas Novita, Juaningsih, Muhmmaad Saef El-Islam, Adit Nurrafi, Junior Hendri Wijaya, Achmad Zufikar, Iman Manda Permatasari, Eko Budi Santoso, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhila, dan Annisa Rahmadanita, selain itu penerapan *e-voting* ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, meraka sangat antusias dalam melakukan peoses simulasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas PMK sebelum Pilkakam berlangsung.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan inovasi baru penerapan sistem *e-voting* pada Pilkakam Kabupaten Lampung Tengah, mengenai factor penghambat dan upaya yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam mengatasi permasalahan berupa factor penghambat penerapan sistem *e-voting* sebagai inovasi pemilihan berbasis teknologi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendakatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sistem *e-voting* ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri dari kepala dinas, kepala bidang keuangan, petugas teknis dan pengguna *e-voting*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penerapan *e-voting* sebagai alternatif pada sistem pemilihan Pilkakam di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung menggunakan teori Teknologi Pungut-Hitung Suara Pemilu oleh Heroik M.Pratama & Nurul Amalia Salabi (2020). Teori ini memiliki 3 dimensi dalam penerapan teknologi pungut-hitung suara pada penerapan *e-voting* yaitu *pengkajian dan perencanaan, pengadaan dan penerapan/pelaksanaan*. Adapun pembahsannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

3.1 Pengkajian dan Perencanaan

Pada dimensi ini terdapat beberapa indikator yang mendukungnya yaitu kesepakatan semua pihak atas penggunaan alternatif, keberadaan landasan hukum dan ketersediaan anggaran *e-voting*, dari ketiga indikator tersebut pengkajian dan perencanaan sangat penting dalam melaksanakan suatu program baru dimana seperti kesepakatan semua pihak terkait antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan penyedia jasa sistem *e-voting*, serta keberadaan hukum dimana setiap perencanaan dalam hal demokrasi harus ada nya landasan hukum supaya menjaga dan menjamin keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ketersediaan anggaran juga menjadi bagian yang di perlukan tanpa adanya anggaran yang mencukupi maka program yang sudah direncanakan akan mengalami hambatan oleh karena itu anggaran menjadi peran utama yang menjadi kan program tersebut akan berjalan, anggaran dibutuhkan untuk memberikan fasilitas yang memadai dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pegawai pengadaan barang dan jasa di sebuah pemerintahan.

3.2 Pengadaan

Fasilitas yang memadai serta berkualitas adalah salah satu komponen atau kebutuhan yang di perlukan dalam penerapan sistem *e-voting*, hal tersebut akan terwujud dari adanya pengadaan barang dan jasa dimana anggaran yang sudah di tetapkan akan di jadikan barang dan jasa sesuai kebutuhan dalam penerapan *e-voting* pada Pilkakam.

Kejelasan penyedia teknologi menjadi hal yang sangat penting dikarenakan teknologi yang dibutuhkan harus mempunyai kualitas yang baik, jika penyedia teknologi tidak diketahui kejelasannya maka akan muncul masalah jika fasilitas tersebut rusak.

3.2 Penerapan/pelaksanaan

Pada dimensi ini terdapat indikator pendukung seperti kemudahan penggunaan teknologi, sosialisasi kepada pemilih (masyarakat) dan kemampuan SDM pelaksana operasional teknologi, dalam hal ini penerapan sistem *e-voting* berjalan dengan baik karena ada nya tahapan persiapan yang dilakukan oleh para panitia terkait. Masyarakat merasa hal ini unik dan baru pertama kali diterapkan antusias masyarakat meningkat setelah mereka mengetahui tata cara penerapan dikarenakan sangat mudah dan tidak memakan waktu yang sangat lama panitia juga terbantu dalam hal pengitungan serta keamanan suara yang sebelumnya harus memakan waktu berhari-hari dengan *e-voting* hanya hitungan jam semua terselesaikan

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala kampung (pilkakam) di Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya diterapkan di seluruh kampung yang ada hanya lima kampung dari 82 kampung dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dilihat melalui teori M. Pratama & Nurul Amali Salabi yang berdasarkan dari tiga dimensi *pengkajian dan perencanaan, pengadaan, penerapan/pelaksanaan* dimana masih terdapat hambatan yang perlu ditindaklanjuti. Adanya kebijakan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) dan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 380/Kpts/ D.A.Vi.13 /2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung, namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yang ditemukan oleh penulis pada penelitian di lapangan, adapun hambatan dalam pelaksanaan penerapan aplikasi *e-voting* adalah Sumber Daya Manusia dan Aparatur yang harus ditingkatkan dan dikembangkan untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan penerapan *e-voting*, anggaran yang di perlu di efisiensi pada penerapan pemilihan kepala kampung (pilkakam), penerapan

aplikasi *e-voting* harus diterapkan di seluruh kampung di Lampung Tengah, serta sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengetahui.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam pelayanan berbasis online dimana pelayanan belum optimal dikarenakan banyak masyarakat kesulitan dalam mengoperasikannya masih banyak masyarakat menganggap bahwa pelayanan secara langsung lebih bisa dipercaya karena bersifat tatap muka, dengan adanya hambatan tersebut Pemerintah khususnya harus lebih memperhatikan kendala-kendala yang terjadi pada masyarakat untuk memperbaiki kendala yang di alami. Pada zaman sekarang seharusnya pelayanan sudah dapat di permudah dengan cara tidak harus datang langsung dan tidak harus menunggu lama dan pelayanan harus mempunyai tempat atau pos lebih dekat dengan daerah masyarakat yang terpencil, seperti *e-voting* sebuah fasilitas pemilihan yang tidak memakan waktu lama serta mempermudah dalam pemilihan dan transparansi kepada masyarakat serta dapat menghemat anggaran pada pelaksanaannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait Penerapan *e-voting* pada pemilihan kepala kampung (pilkakam) di Kabupaten Lampung Tengah dengan merujuk pada teori penerapan teknologi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pengkajian dan perencanaan

Penerapan *e-voting* pemilihan kepala kampung (pilkakam) di Kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan pada tahap percontohan. Pada tahap perencanaan Kesepakatan semua pihak atas penggunaan alternatif sudah disetujui dengan bukti adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Lampung tengah serta Dinas PMK sebagai penyelenggara *e-voting* dan PT.Intens sebagai penyedia jasa *e-voting*. landasan Hukum penerapan *e-voting* pada pemilihan kepala kampung (pilkakam) di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022 .Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 2022, Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 380/Kpts/ D.A.Vi.13 /2022.

b. Pengadaan

Pada tahap pengadaan, kejelasan penyedia teknologi sangat jelas dimana Dinas PMK kerja sama dengan PT.Intens yang mempunyai produk *e-voting* yang sudah tersertifikat dan sudah banyak digunakan di kabupaten dan desa di Indonesia bahkan ada 22 Kabupaten dan lebih dari 1000 desa di Indonesia yang telah menggunakan *e-voting*.

c. Penerapan/Pelaksanaan

Pada tahap penerapan/pelaksanaan kemudahan mengopersikan *e-voting* terdapat tata caranya sehingga masyarakat mampu mempelajari dan di dampingi oleh tim teknis yang berada di lapangan. Sosialisasi serta simulasi yang di lakukan pada lima kampung tersebut di lakukan secara bertahap dan bergelombang. Sosialisasi dan simulasi oleh tim teknis, pelaksanaan pelatihan pada masyarakat ini bertujuan supaya dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai harapan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anistiawati, Made Leita. "Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)" (2014).
- Hardjaloka, Loura, and Varida Megawati Simarmata. "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 579.
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47.

